



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIL
2. Jabatan : WAKIL REKTOR II
3. NHK : 511870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V RUI 1.5 E CVT CKD / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, JIMNY 729/800CC/LJ 80 V HARDTOP SUZUKI JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 64.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 756.013.279

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.965.613.279

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.965.613.279

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.